

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI” (STUDI KASUS
PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN, PROVINSI PAPUA)”**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :
TERENCE R. SALVATOR SAWAKI
(12190520)

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DUTA WACANA
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai
Variabel Mediasi” (Studi Kasus pada Pemerintah
Kota/Kabupaten Provinsi Papua)

Nama : Terence Roberth Salvator Sawaki

NIM : 12190520

Mata Kuliah : Skripsi

Program Studi : Akuntansi

Semester : Ganjil

Tahun Akademik : 2023/2024

Telah diperiksa dan disetujui
Yogyakarta, 21 Desember 2023


Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si

DUTA WACANA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Terence R. Salvator Sawaki
NIM : 12190520
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI” (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN, PROVINSI PAPUA)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

Yang menyatakan



Terence R. Salvator Sawaki
12190520

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN PROVINSI PAPUA)”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

TERENCE ROBERTH SALVATOR SAWAKI

12190520

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal (18 Januari 2024)

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc.
(Ketua Tim Penguji)
2. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Ak., CA.
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si.
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 18 Januari 2024

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.



Rossalina Christanti, S.E., M.Acc.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul :

**Analisis Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi” (Studi Kasus
pada Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Papua)**

yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau aplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika di kemudian hari didapati bahwa skripsi ini adalah plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenakan sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 21 Desember 2023



Terence R. Salvator Sawaki

12190520

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi” (Studi Kasus pada Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Papua)**. Penyusunan penulisan skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa setiap proses penulisan dari awal sampai akhir tidak mudah. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang mendampingi dan memberikan arahan dalam penyusunan penulisan penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan penulisan penelitian ini, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan penelitian dimasa mendatang. Penulis berharap penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

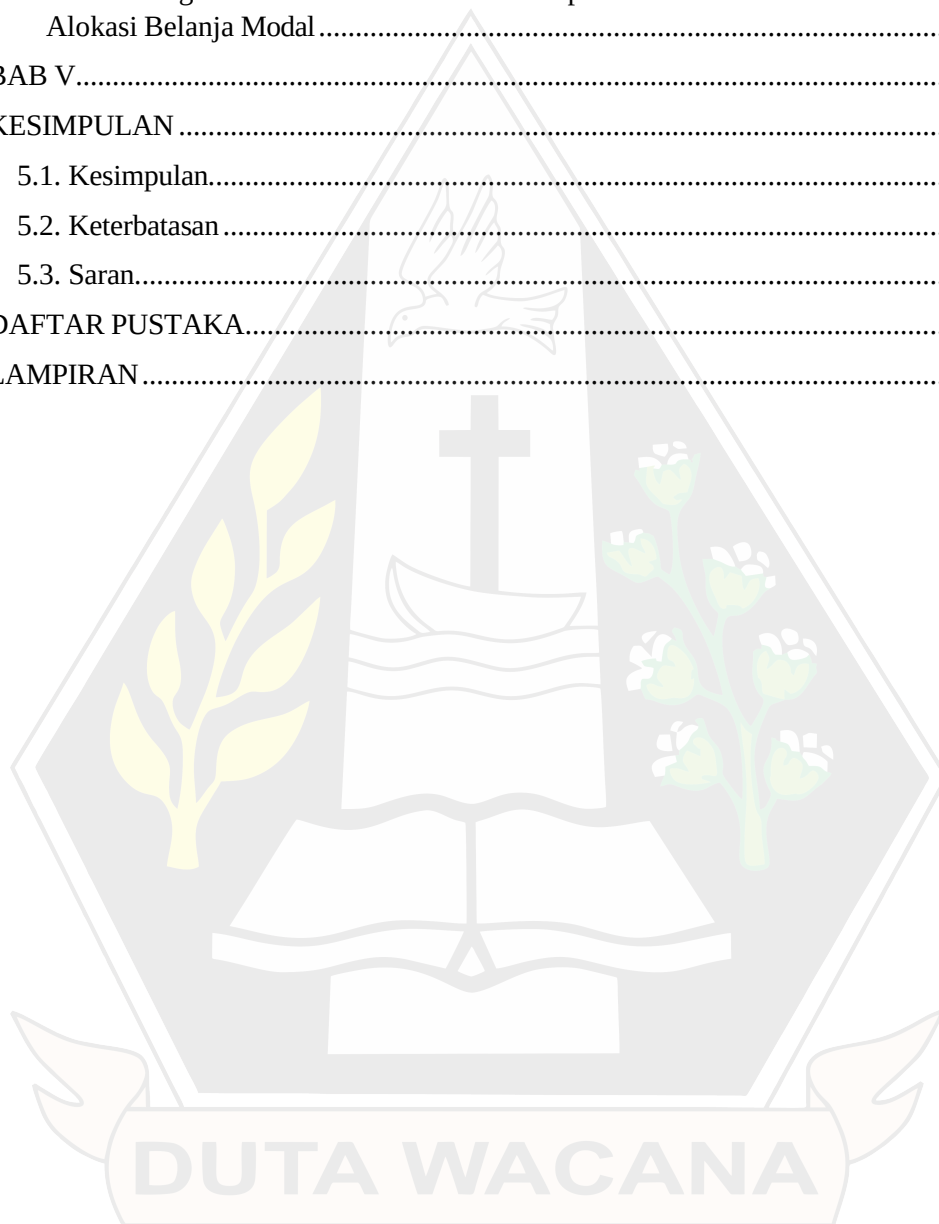
DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Komponen dan Link	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kontribusi Penelitian	8
1.6. Batasan Penelitian	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2. Teori Sinyal	9
2.1.3. Otonomi Daerah	10
2.1.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	10
2.1.3.1.1 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	10
2.1.3.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	10
2.1.3.2. Fungsi APBD	11
2.1.3.3. Komposisi dan Klasifikasi Pendapatan Daerah.....	11
2.1.3.3.1 Pendapatan Daerah	12
2.1.3.3.2 Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.3.3.3 Belanja Daerah	13
2.1.3.3.4 Belanja Modal	13
2.1.3.4 Kinerja.....	13

2.1.3.5 Kinerja Keuangan.....	14
2.1.3.5.1 Rasio Derajat Desentralisasi.....	14
2.1.3.5.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	15
2.1.3.5.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	15
2.1.3.5.4 Rasio Efektifitas PAD.....	15
2.1.3.5.5 Rasio Kontribusi BUMD.....	16
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	19
2.3.1. Hubungan antara Derajat Desentralisasi dengan Belanja Modal.....	19
2.3.2. Hubungan antara Ketergantungan Keuangan dengan Belanja Modal	20
2.3.3. Hubungan antara Kemandirian Keuangan dengan Belanja Modal	21
2.3.4. Hubungan antara Efektifitas PAD dengan Belanja Modal	21
2.3.6. Hubungan Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi	22
2.3.7. Hubungan antara Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi	22
2.3.8. Hubungan antara Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Dimediasi Belanja Modal	23
2.3.9. Hubungan antara Ketergantungan Keuangan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dimediasi Belanja Modal.....	23
2.3.10. Hubungan antara Kemandirian Keuangan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dimediasi Belanja Modal.....	24
2.3.11. Hubungan antara Efektivitas PAD Dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dimediasi Belanja Modal	24
2.3.12. Hubungan antara Kontribusi BUMD Dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dimediasi Belanja Modal.....	25
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN	26
3.1 Data dan Sumber	26
3.2 Definisi Variabel dan Pengukurannya	26
3.2.1 Variabel Independen.....	26
3.2.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi	26
3.2.1.2 Rasio Ketergantungan.....	27
3.2.1.3 Rasio Kemandirian	27
3.2.1.4 Rasio Efektifitas PAD	27
3.2.1.5 Rasio Kontribusi BUMD.....	28
3.3.2 Variabel Mediasi	28
3.3.2.1 Alokasi Belanja Modal	28

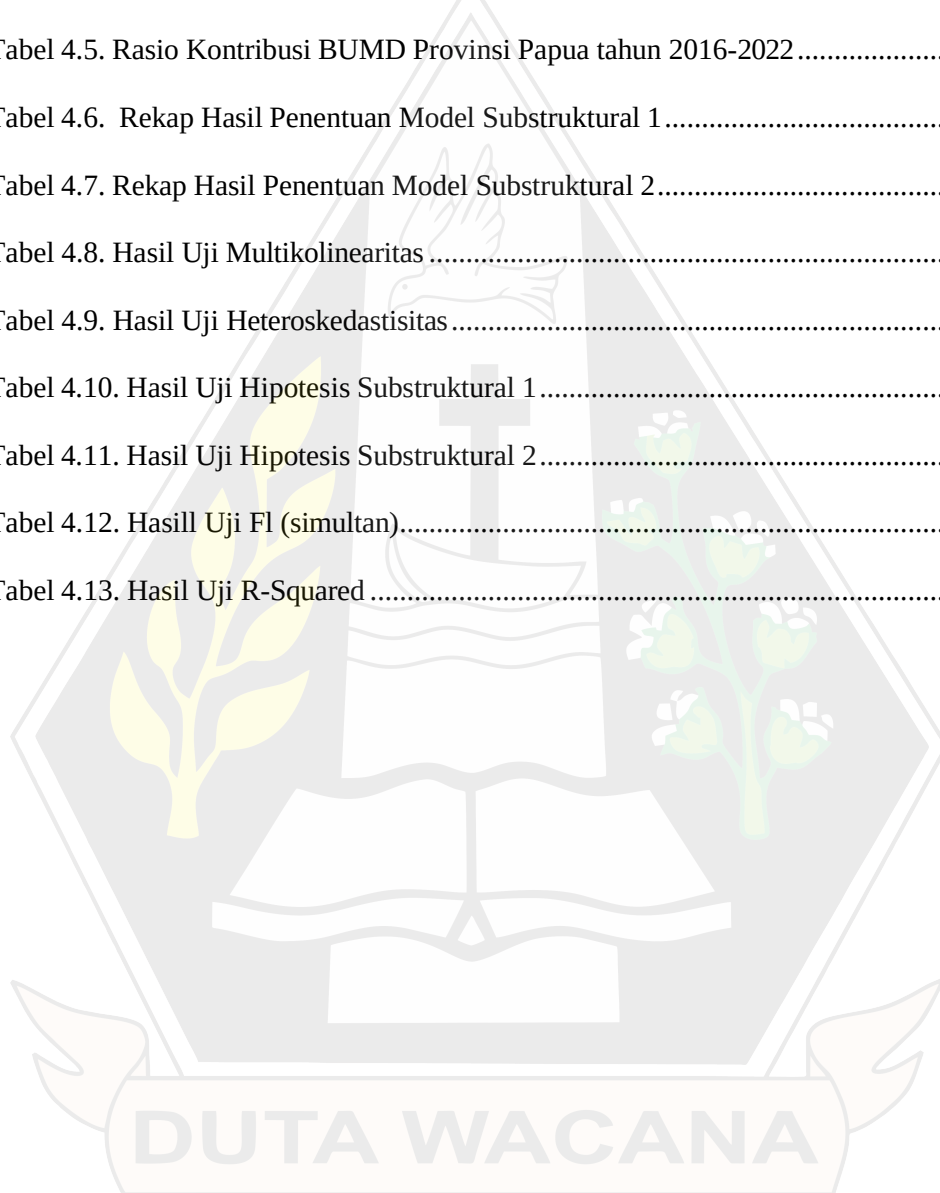
3.3.3 Variabel Dependen	29
3.3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	29
3.3 Desain Penelitian.....	29
3.4. Model Statis dan Uji Hipotesis.....	30
3.4.1. Penentuan Model Regresi Data Panel.....	30
3.4.2. Uji Asumsi Klasik	33
3.4.2.1. Uji Multikolinearitas.....	33
3.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas	33
3.4.3. Uji Hipotesis.....	34
3.4.3.1. Uji t.....	34
3.4.3.2. Uji F	34
3.4.3.3. Uji R ²	34
3.5. Analisis Rasio Keuangan.....	35
3.6. Analisis Regresi Data Panel	35
BAB IV	36
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Sampel Penelitian.....	36
4.2. Statistik Deskriptif.....	36
4.3. Hasil Penentuan Model Regresi Data Panel.....	39
4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	40
4.4.1. Hasil Uji Multikolinearitas	40
4.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	41
4.5. Hasil Uji Hipotesis	41
4.5.1. Hasil Uji t	41
4.5.1.1. Hasil Uji Substruktural 1	41
4.5.1.2. Hasil Uji Substruktural 2.....	43
4.6. Uji F	45
4.7. Uji R-Squared.....	45
4.8. Pembahasan.....	46
4.8.1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal.....	46
4.8.2. Pengaruh Ketergantungan Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal	46
4.8.3. Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal.....	47
4.8.4. Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal	47
4.8.5. Pengaruh Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal.....	47
4.8.6. Pengaruh Simultan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	48
4.8.7. Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	49

4.8.8. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal.....	49
4.8.10. Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal.....	50
4.8.11. Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal.....	51
4.8.12. Pengaruh Kontribusi BUMD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal	51
BAB V.....	53
KESIMPULAN	53
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Keterbatasan	54
5.3. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	58



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rasio Desentralisasi Provinsi Papua tahun 2016-2022.....	36
Tabel 4.2. Rasio Ketergantungan Provinsi Papua tahun 2016-2022.....	37
Tabel 4.3. Rasio Kemandirian Provinsi Papua tahun 2016-2022	37
Tabel 4.4. Rasio Efektivitas PAD Provinsi Papua tahun 2016-2022.....	38
Tabel 4.5. Rasio Kontribusi BUMD Provinsi Papua tahun 2016-2022	39
Tabel 4.6. Rekap Hasil Penentuan Model Substruktural 1	39
Tabel 4.7. Rekap Hasil Penentuan Model Substruktural 2	40
Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolinearitas	40
Tabel 4.9. Hasil Uji Heteroskedastisitas	41
Tabel 4.10. Hasil Uji Hipotesis Substruktural 1	42
Tabel 4.11. Hasil Uji Hipotesis Substruktural 2	43
Tabel 4.12. Hasil Uji F1 (simultan).....	45
Tabel 4.13. Hasil Uji R-Squared	45



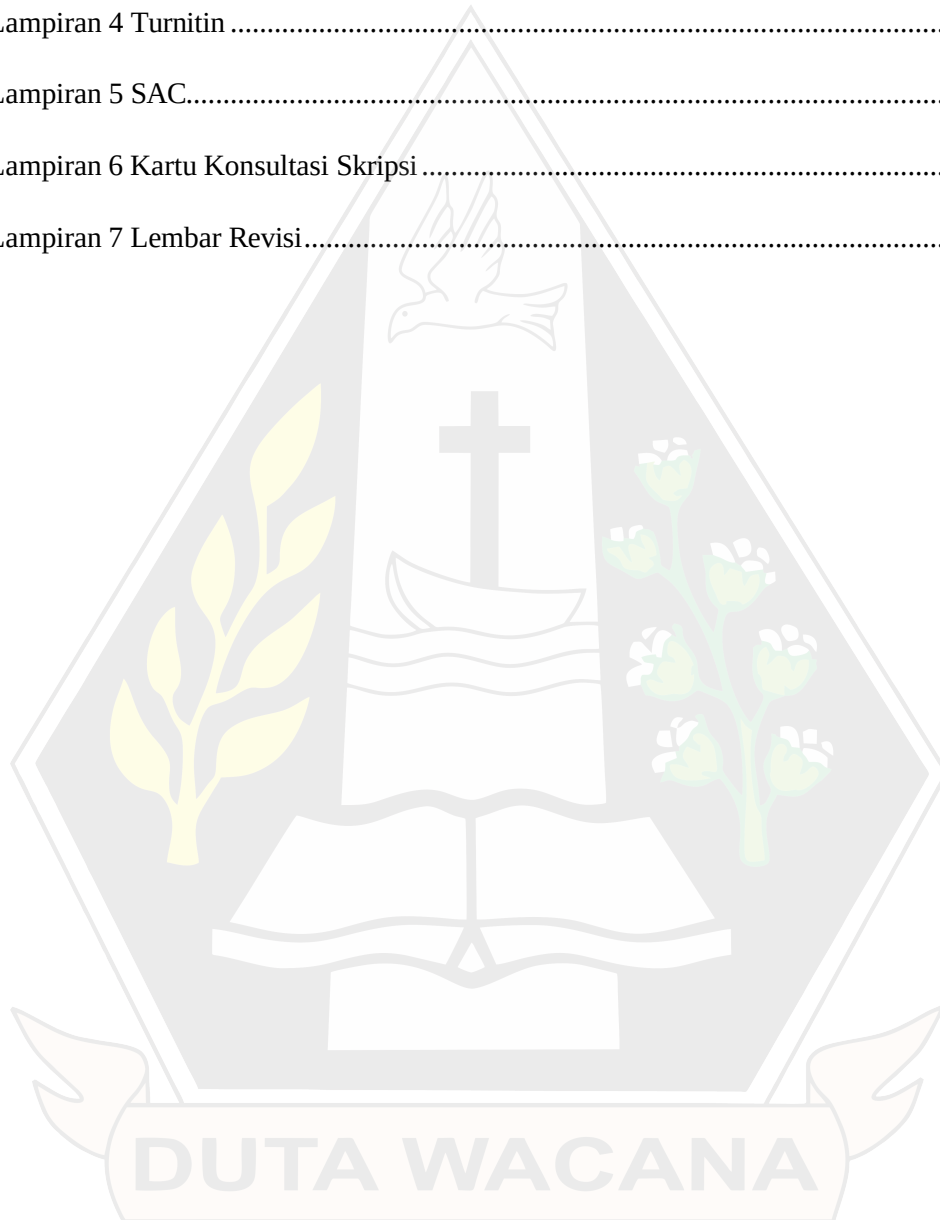
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komponen dan Tautan	66
Gambar 3.1. Desain Penelitian	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Panel.....	58
Lampiran 2 Penentuan Model Regresi Data Panel Substruktural 1.....	59
Lampiran 3 Statistik Desk	62
Lampiran 4 Turnitin	64
Lampiran 5 SAC.....	65
Lampiran 6 Kartu Konsultasi Skripsi	66
Lampiran 7 Lembar Revisi.....	67



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI
VARIABEL MEDIASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH
KOTA/KABUPATEN PROVINSI PAPUA)**

Terence Roberth Salvator Sawaki

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

Email: terencesawaki@outlook.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota/kabupaten provinsi Papua yang dimediasi oleh alokasi belanja modal tahun 2016-2022. Sampel penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan dari data time-series dan cross-section pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari situs resmi DJKP Kemenkeu. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Regresi Data Panel dengan membagi proses pengujian yaitu substruktural pertama yang menguji pengaruh variabel rasio-rasio kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah lalu pada substruktural kedua untuk menguji pengaruh rasio-rasio kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dimediasi oleh alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan variabel rasio kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada pengujian substruktural pertama, lalu pada pengujian substruktural kedua variabel rasio desentralisasi, efektifitas PAD, dan kontribusi BUMD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dimediasi oleh alokasi belanja modal.

Kata Kunci: Derajat Desentralisasi, Ketergantungan, Kemandirian, Efektivitas PAD, Kontribusi BUMD, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Alokasi Belanja Modal.

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE ON REGIONAL ECONOMIC
GROWTH WITH CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION AS A
MEDIATION VARIABLE (CASE STUDY ON PAPUA CITY/DISTRICT
GOVERNMENT)**

Terence Roberth Salvator Sawaki

Accounting Study Program, Faculty of Business

Duta Wacana Christian University

Email: terencesawaki@outlook.com

ABSTRACT

The study aims to analyze the financial performance of the government of Papua city/province district mediated by the allocation of capital expenditure in 2016-2022. The sample of this research uses panel data, which is a combination of time-series and cross-section data on the Regional Revenue and Purchasing Budget realisation report obtained from the official DJKP Kemenkeu website. The test carried out in this study is the Panel Data Regression Test by dividing the process of testing that is the first sub-structural that tests the influence of the variable ratio-ratio of financial performance on the growth of the region past on the second sub-structural to test the impact of the ratio - ratio of the financial engineer on the development of the economic region mediated by the allocation of capital expenditure. The results of the research showed that there was a significant influence of the variable ratio of BUMD contribution to regional economic growth in the first substructural test, then in the second substructural test of variables of the decentralization ratio, the effectiveness of the PAD, and the contribution of BOMD had a significant impact on the economic growth of the region mediated by the allocation of capital expenditure.

Keywords: Degree of Decentralization, Dependency, Independence, PAD Effectiveness, BUMD Contribution, Regional Economic Growth, Capital Expenditure Allocation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara yang sejahtera adalah negara yang bertumbuh ekonominya. Tingkat pertumbuhan produksi, atau GDP (Gross Domestic Product), adalah salah satu patokan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, GDP dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB), yang berfungsi untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah (Romhadhoni et al., 2019). Meskipun kegiatan ekonomi daerah memberikan sumbangsih nilai sumber daya tertentu, kemampuan perekonomian daerah di Indonesia tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Badan Pusat Statistik, 2010). Angka pertumbuhan ekonomi daerah yang dilaporkan dalam Data PDRB tahun 2022 menunjukkan bahwa kelompok provinsi di Pulau Jawa terus membentuk struktur perekonomian Indonesia. Angka Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang dilaporkan dalam Data PDRB tahun 2022, provinsi di Pulau Jawa masih memuncaki hirarki perekonomian Indonesia secara khusus selama tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 56,48 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,04 persen, Pulau Kalimantan sebesar 9,23 persen, Pulau Sulawesi sebesar 7,03 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,72 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,50 persen (Badan Pusat Statistik, 2023).

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan penuh pemerintah daerah untuk mengelolah seluruh aspek perekonomian daerah (Zakhiya, 2011). Jumlah PDRB dapat dihitung dengan beberapa cara. Salah satunya adalah Pendekatan Pengeluaran, yang mencakup

pengeluaran konsumsi pemerintah, yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah untuk investasi modal dalam barang dan jasa (Badan Pusat Statistik, 2010). Salah satu bagian dari belanja negara untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah transfer ke daerah, yang merupakan bagian dari pemberian kewenangan tersebut dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi perbedaan di antara daerah (Rahmanda, 2018). Transfer ke daerah termasuk dalam belanja negara dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian (Rahmanda, 2018). Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibuat untuk memperbaiki pembinaan dan pengawasan kebijakan keuangan daerah. Peraturan ini mengatur keuangan daerah yang dikelola pemerintah daerah, yang bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka, mulai dari perancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, dan akuntansi.

Proses penyusunan anggaran dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari rencana kerja pada setiap lini kerja, lalu dengan dokumen usulan anggaran, yang akan menjadi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dokumen pengajuan tersebut kemudian akan di nilai Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) lalu akan ditindak lanjuti oleh DPRD (Muthahhari, 2020).

Kinerja pemerintah dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada organisasi atau sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian, 2006). Beberapa

ukuran kinerja digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan mereka. Ini termasuk pertumbuhan, ketergantungan, ketergantungan, kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan rasio keserasian (Sularso & Restianto E. Y., 2011).

Kinerja keuangan menunjukkan seberapa jauh organisasi atau organisasi telah mencapai tujuan mereka. Pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh oleh peran kinerja keuangan pemerintah yang efektif. Untuk mengetahui seberapa efektif kinerja keuangan pemerintah, perbandingan anggaran harus dilakukan untuk menilai pencapaian selama periode waktu tertentu (P. A. Suwandi, 2013). Belanja modal yang dilakukan untuk membangun fasilitas publik juga berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Fasilitas publik ini dianggap sebagai aset daerah dan memiliki nilai manfaat jangka panjang, dan merupakan modal yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (Fajri, 2016).

Belanja modal terbagi menjadi dua kelompok. Belanja pemerintah publik termasuk belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan jaringan, jembatan, dan pembelian mobil ambulan untuk umum. Belanja aparatur termasuk belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh pemerintah, seperti pembangunan gedung dewan, dan pembelian mobil ambulan untuk umum. Kelompok kedua terdiri dari belanja aparatur. Belanja ini termasuk belanja yang berdampak langsung pada masyarakat tetapi tidak dapat dirasakan langsung oleh Anggaran belanja modal hampir selalu mencakup pengeluaran dalam jangka waktu yang cukup lama (Sularso & Restianto E. Y., 2011). Masalah Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Papua seringkali terjadi di berbagai sektor ekonomi, jumlah kemiskinan

yang terus naik dari tahun ke tahun dengan data Jumlah Penduduk Miskin menurut Pulau oleh BPS tahun 2022 Maluku dan Papua berada di angka 20,10 persen, angka ini menjadi persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia, sementara itu angka statistik Pendidikan di Provinsi Papua yang dipaparkan Badan Pusat Statistik dalam Angka Anak Tidak Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Provinsi Papua masih memiliki persentase yang tinggi dengan kelompok Umur 7-12 tahun 7,30 persen, kelompok umur 13-15 tahun 21,67 persen, dan kelompok umur 16-18 tahun 34,87 persen, angka tersebut menjadikan Papua adalah provinsi yang memiliki jumlah Anak Tidak Sekolah terbanyak di Indonesia paling tinggi di antara provinsi lain. Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua juga masih memiliki persentase yang rendah 61,39 persen menjadikan Papua sebagai provinsi dengan IPM terendah di Indonesia (BPS, 2022). Data Pembangunan infrastruktur di Papua juga menjadi yang terendah karena kondisi geografis yang dipaparkan dalam Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) oleh Kementerian PUPR tahun 2022 yang mencapai angka 207,11 yang artinya kondisi geografis Papua juga menjadi faktor lambannya pembangunan infrastruktur di Papua (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2022). Data tersebut dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua sangat kompleks karena faktor pendukung untuk kemajuan perekonomian daerah seperti SDM dan Infrastruktur di Papua masih jadi yang terendah.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang baik adalah dampak dari konsistensi dan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan di daerah. Mulai tahap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) hingga akhir pelaporan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan runtut penting dari

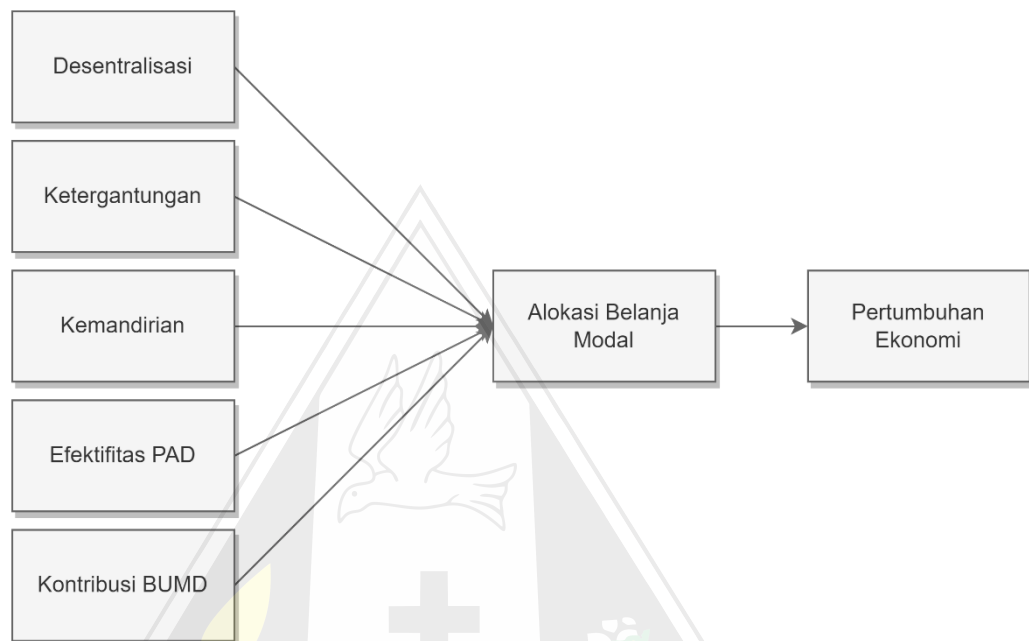
tanggung jawab pemerintah daerah yang tentunya diharapkan memberikan dampak lebih bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Semakin baik kinerja pemerintah daerah maka semakin efektif dan efisien pula penggunaan anggaran dan belanja daerah yang dirancang sesuai kebutuhan daerah dalam suatu periode.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana alokasi belanja modal berdampak pada kinerja keuangan, yang mencakup tingkat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan tingkat kontribusi BUMD. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi seberapa besar pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kota atau kabupaten di Provinsi Papua.

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN PROVINSI PAPUA)”

DUTA WACANA

1.2. Komponen dan Link



Gambar 1.1. Komponen dan Tautan

Komponen dan Link memberikan gambaran singkat mengenai alur pengujian analisis pada topik dalam penelitian ini. Terdapat komponen seperti Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, dan Derajat Kontribusi BUMD yang berdiri sebagai variabel bebas, adapun Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel terikat dan Alokasi Belanja Modal sebagai variabel mediasi.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?
2. Apakah Ketergantungan Keuangan berpengaruh terhadap Belanja Modal?

3. Apakah Kemandirian Keuangan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?
4. Apakah Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?
5. Apakah Kontribusi BUMD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?
6. Apakah Derajat Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan, Kemandirian Keuangan, Efektifitas PAD, dan Derajat Kontribusi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah?
7. Apakah Alokasi Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah?
8. Apakah derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektifitas pad, dan derajat kontribusi bumd berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah jika dimediasi oleh alokasi belanja modal?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Alokasi Belanja Modal?
2. Untuk menganalisis pengaruh Ketergantungan Keuangan terhadap Belanja Modal.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal.
4. Untuk menganalisis pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal.

5. Untuk menganalisis pengaruh Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal.
6. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
7. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
8. Untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektifitas pad, dan derajat kontribusi bumd terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimediasi alokasi belanja modal.

1.5. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini akan memberikan sumbangsih bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk mengupayakan peningkatan kinerja keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Papua, menjadi informasi handal bagi masyarakat tentang kinerja keuangan pemerintah dan sebagai acuan untuk penelitian berikut di masa mendatang.

1.6. Batasan Penelitian

1. Periode dalam penelitian ini menggunakan Tahun Anggaran 2016-2022
2. Penelitian ini hanya menggunakan rasio keuangan daerah seperti Derajat Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Kontribusi BUMD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang dimediasi Alokasi Belanja Modal.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam berbagai usaha yang dilakukan pemerintah provinsi Papua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah baik, seringkali terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan perekonomian yang sejahtera bagi masyarakat di daerah. Kendala yang dialami di daerah dibuktikan dalam rasio kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dari pengujian dua substruktural memperlihatkan hasil yang berbeda, pada substruktural pertama menguji pengaruh rasio-rasio kinerja keuangan terhadap belanja modal yang menjelaskan bahwa variabel kontribusi BUMD memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini karna BUMD adalah badan usaha daerah yang dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha di daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah termasuk kegiatan belanja modal untuk investasi jangka panjang di daerah seperti infrastruktur dan sebagainya.

Substruktural kedua menguji pengaruh rasio-rasio kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dimediasi oleh belanja modal yang menunjukkan hasil yang berbeda, beberapa rasio kinerja keuangan seperti rasio desentralisasi, rasio efektivitas PAD, dan rasio kontribusi BUMD yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah jika dimediasi oleh belanja modal. Hasil ini mengartikan bahwa belanja modal memiliki peran penting untuk pertumbuhan ekonomi

daerah sebagai jembatan penguat kinerja keuangan pemerintah daerah jika ingin mengangkat perekonomian daerah menjadi lebih baik, dimulai dari memacu kinerja keuangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai bentuk realisasi program otonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer ke daerah dari APBN oleh pemerintah pusat. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik akan menghasilkan PAD yang tinggi sehingga belanja modal yang dilakukan akan lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari proyek-proyek daerah seperti pembangunan infrastruktur, pembelian aset tetap daerah, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu SDM, dan sebagainya.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada data yang digunakan dalam yaitu data APBD dan PDRB atas dasar pengeluaran tahun 2016-2022 yang berasal dari situs [djkg.kemenkeu](http://djkg.kemenkeu.go.id) dan bps.go.id. Data kinerja keuangan yang seharusnya dipublikasi oleh pemerintah provinsi Papua dalam situs resmi pemerintah justru tidak ada. Pemerintah provinsi Papua juga tidak menjelaskan komponen apa saja yang terdapat dalam pendapatan asli daerah sehingga cukup sulit bagi penelitian ini untuk membahas lebih jauh terkait hasil-hasil kekayaan daerah yang meningkatkan pendapatan asli daerah.

5.3. Saran

Saran penelitian ini ditujukan untuk pemerintah provinsi Papua untuk lebih memperhatikan sisi transparansi kinerja keuangan untuk dapat diakses oleh masyarakat sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap mandat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Salah satu media transparansi pemerintah daerah adalah situs resmi pemerintah daerah yang menjadi media utama informasi penting kegiatan, program, dan perkembangan daerah, namun kenyataan di lapangan berbeda situs resmi pemerintah provinsi Papua cukup terbengkalai dan informasi yang tersedia bagi masyarakat yang mengakses sangat terbatas, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi Papua dapat mencontoh pemprov lain di Indonesia yang mengedepankan transparansi melalui media situs resmi pemerintah dengan berbagai fitur yang memudahkan pengguna salah satunya adalah dilik aduan bagi masyarakat secara daring dalam situs resmi pemerintah daerah.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan data yang lebih banyak dari sumber yang resmi dan mungkin meggunaka metode pengukura rasio yang berbeda untuk dapat menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). ANALISIS HUBUNGAN ANTARA BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, KEMANDIRIAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11(1), 68–79.
- Arsa, K., & Setiawan, N. D. (2015). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PADA ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI TAHUN 2006 S.D. 2013. *Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 105–112.
- Ayu, A. L., & Rahayu, S. (2019). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>
- BPS. (2022). *Data jumlah Penduduk Miskin di Indonesia menurut Pulau tahun 2022*.
- Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1170–1181.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2022). *Statistik Infrastruktur PUPR 2022*.
- Melmambessy, D., Manajemen, D. P., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Numbay, P. (n.d.). *JURNAL EKONOMI & BISNIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*.
- Muslih, M., & Rahadi, D. R. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*.
- Muthahhari, M. R. (2020). Jaringan Komunikasi Politik yang Dipilih Kepala Daerah dalam Proses Perumusan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2019. *ETTISAL : Journal of Communication*, 5(1). <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3948>
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni, Y. (2018). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI RIAU. *Jurnal Benefita*, 3(3), 336. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3350>
- Pasaribu, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. *AKUNTABILITAS*.
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 113. <https://doi.org/10.24198/jmi.v14.n2.19262.115-121>

- Siagian, A. onny. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA TRANSFER TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(2), 141–158. <https://doi.org/10.24123/jbt.v4i2.2848>
- Sukarmi, W. N., & Budiasih, N. I. (2016). ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH KINERJA KEUANGAN PADA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI. *E-Journal Ekonomi Dan Bisnis Udayana*, 5.
- Sularso, H., & Restianto E. Y. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2), 109–124.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). In *Jurnal InFestasi* (Vol. 11, Issue 2).
- Wahyuni, E. (2018). *PENGARUH KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH BELANJA MODAL DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH* Lilis Ardini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Zakhiya, M. (2011). *Afrizal tahar*.

